

## KATA PENGANTAR

### KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN BAGI PEMBANGUNAN DAERAH TERLANJUTKAN

**Hadi S Alikodra**

Guru Besar Institut Pertanian Bogor

Pertumbuhan manusia dan pembangunan yang terus meningkat, telah memberikan dampak buruk terhadap biosfir. Penyempitan habitat, kerusakan tanah, serta pencemaran udara dan air, semakin menekan keanekaragaman hayati. Barbier (1992), menyatakan bahwa krisis keanekaragaman hayati saat ini, dikarenakan tingginya laju kepunahan. Sangat tepat, jika MacKinnon *et al* (1986) menyatakan, bahwa perlu dibangun dan dianut suatu etika baru bagi prinsip yang melandasi pembangunan nasional. Khususnya menunjukkan, bahwa betapa pentingnya pelestarian sumberdaya alam yang terpulihkan, sebagai jaminan bagi terlaksananya pembangunan terlanjutkan. Tujuan pelestarian ini secara lengkap tertuang dalam strategi konservasi dunia.

Pemerintah Indonesia, mengembangkan kebijakan konservasi alam dalam sistem pengelolaan taman-taman nasional, yang dideklarasikannya pada saat Kongres Taman Nasional Sedunia III di Denpasar, Bali, tahun 1982. Semangat yang menggelora dalam menggagas dideklarasikannya sejumlah taman nasional, dua puluh tahun silam, adalah dalam rangka mewujudkan semboyan "hutan bagi rakyat". Semboyan ini mengandung maksud yang sangat mendalam, bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat, dan bagi perlindungan serta pelestarian alam.

Hingga saat ini, gagasan tersebut belum terwujud, masih perlu kerja ekstra keras. Para Kepala Daerah pun seringkali melontarkan pertanyaan, apa manfaat taman nasional bagi masyarakatnya. Memang, dalam implementasinya

mengalami berbagai hambatan, terutama karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar taman-taman nasional kita yang relatif rendah, pengertian dan partisipasi rendah, serta lemahnya penegakan hukum. Banyak laporan, yang menunjukkan kerusakan yang semakin meningkat di berbagai taman nasional di Indonesia.

Tujuan bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat setempat, memang masih banyak kendala. Karena keuntungan ekonomi yang besar dari pemanfaatan keanekaragaman hayati, banyak dinikmati bukan oleh masyarakat asli setempat (McNeely, 1988). Banyak faktor yang harus dikemas secara tepat baik bagi kegiatan wisata alam, ataupun bagi pengembangan bioprospeksi. Pada umumnya, potensi keanekaragaman hayati taman-taman nasional kita sangat tinggi. Namun, kemampuan penelitian dan manajemennya sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang tepat, untuk segera menekan berbagai kelemahan. Hal ini sangat penting, dalam rangka mewujudkan peran taman nasional, baik bagi masyarakat sekitar maupun bagi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Potensi kekayaan alam, pesona alam dan keanekaragaman hayati taman-taman nasional kita sangat tinggi, mestinya dapat dipakai sebagai modal dasar, untuk menangkap permintaan wisata alam dunia dan keperluan bahan baku obat-obatan yang terus meningkat. Untuk menjamin kelestariannya, perlu dilakukan penataan obyek wisata alam secara tepat, dan pengembangan budidaya tumbuhan obat. Program ini harus pula melibatkan

masyarakat sekitar taman nasional, sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Oleh karena itu sangat tepat, jika dalam penerbitan Berita Biologi Edisi Khusus ini mengangkat topik "Konservasi Keanekaragaman Hayati di Taman Nasional Gunung Halimun". Melalui cara ini, masyarakat luas akan dapat memahami potensi penting keanekaragaman hayati dan berbagai permasalahannya. Sehingga, dapat mendorong keberhasilan konservasi alam di kawasan ini, yang meliputi perlindungan dan pelestarian potensi taman nasional, termasuk keanekaragaman hayati, dan pemanfaatannya secara bijaksana.

Makalah-makalah yang disajikan dalam edisi ini, ditulis atas dasar hasil penelitian lapangan di Taman Nasional Gunung Halimun. Kegiatan penelitian lapangan ini, merupakan implementasi dari proyek konservasi keanekaragaman hayati, yang merupakan kerjasama teknik, antara Pemerintah Indonesia dan Jepang. Interpretasi berbagai hasil penelitian ini sangat penting, bagi peningkatan program-program konservasi yang diselenggarakan oleh taman nasional, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Ham (1992) menyatakan, bahwa interpretasi adalah suatu proses untuk mengkomunikasikan fenomena alam kepada masyarakat umum.

Gunung Halimun ditetapkan sebagai taman nasional berdasarkan SK Menteri Kehutanan no. 282/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992 dengan luas kawasan 40.000 hektar. Taman nasional ini termasuk kawasan konservasi alam yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Terdiri dari berbagai tipe ekosistem, berbagai jenis flora dan fauna, diantaranya termasuk jenis-jenis yang dilindungi. Disamping itu, budaya asli masyarakat desa di sekitar kawasan memiliki keterkaitan yang erat dengan konservasi taman nasional ini. Seperti dibahas oleh Hidayat dan Fijridiyanto (hal. 125), bahwa tindakan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun perlu memahami pola hidup

masyarakat sekitar kawasan, agar sejalan dengan kebutuhan mereka.

Menurut hasil penelitian Tahan Uji (hal. 1) paling tidak telah berhasil dikoleksi sebanyak 275 jenis tumbuhan, yang terdiri atas 109 jenis pepohonan, 52 jenis perdu, 22 jenis semak, 27 jenis liana/pemanjat, 50 jenis tera, dan 15 jenis tumbuhan epifit. Dari 275 jenis tumbuhan yang dikoleksi, enam jenis diantaranya termasuk dalam daftar tumbuhan langka. Disamping itu, juga diketemukan 10 jenis lainnya yang termasuk sebagai tumbuhan "new record", karena belum tercantum dalam buku "Flora of Java". Ada dua kelompok jenis tumbuhan berpotensi penting, masing-masing adalah kelompok tumbuhan obat dan kelompok kayu bangunan.

Masyarakat sekitar taman nasional banyak yang mengambil kayu bangunan, kayu bakar, tumbuhan obat, madu, rotan, ataupun berburu satwaliar. Pemanfaatan keanekaragaman hayati atas dasar hasil budidaya sangat terbatas, baru ada budidaya rotan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cisungang, seperti disampaikan dalam makalahnya Johanis F Moge (hal. 33). Untuk itu, perlu dikembangkan budidaya tumbuhan obat, disamping budidaya rotan. Kemampuan masyarakat untuk membuat barang-barang kerajinan dan cinderamata perlu ditingkatkan. Program interpretasi Taman Nasional Gunung Halimun yang telah dirintis, supaya terus dikembangkan, sesuai dengan tujuan wisata alam.

Saat ini, pembangunan Taman Nasional Gunung Halimun dilakukan secara terbatas. Hal ini tentunya sangat terkait dengan kemampuan personal dan pendanaan yang terbatas. Oleh karenanya, dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan pemerintah daerah Kabupaten Lebak perlu terus ditingkatkan secara nyata. Tanpa dukungan ketiga pemerintah daerah ini, sulit untuk mempertahankan keberadaan Taman Nasional Gunung Halimun. Untuk itu, pola pembangunan-

nya harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan ketiga kabupaten terkait. Daerah penyangga taman nasional supaya terus ditingkatkan kemampuannya, melalui kerjasama yang intensif dengan berbagai dinas terkait, ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Dalam tahap pertama, diperlukan kebulatan tekad daerah, bersama berbagai stake-holders untuk memobilisir seluruh kemampuan yang dimilikinya, bagi konservasi Taman Nasional Gunung Halimun. Peran DPRD, sebagai wakil rakyat menjadi sangat penting. Koordinasi dengan propinsi dan pemerintah pusat akan tetap diperlukan, disamping untuk meningkatkan kemampuan institusi daerah dalam menangani permasalahan pembangunan taman nasional yang sifatnya lintas batas kabupaten, juga untuk meningkatkan kemungkinan kerjasama dengan berbagai negara ataupun berbagai lembaga internasional.

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan program pembangunan Taman Nasional Gunung Haliman, diperlukan kemampuan petugas lapangan untuk melakukan advokasi secara tepat, akan pen-

tingnya taman nasional bagi pembangunan daerah, bagi perlindungan tata air dan banjir, dan bagi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Advokasi ini perlu mendapat prioritas, dan dilakukan secara terus menerus, hingga timbul kesadaran pemerintah daerah bersama masyarakatnya untuk melakukan program pembangunan yang berintikan taman nasional.

#### REFERENSI

- Barbier EB. 1992.** Economics for the wilds. Dalam: *Economics for the wilds*. Swanson TM and EB Barbier, eds., pp: 15-33. Earthscan Publications Ltd, London, UK.
- Ham SH. 1992.** *Environmental interpretation*, 455 pp. North American Press, Colorado, USA.
- MacKinnon J, K MacKinnon, G Child, J Thorsell. 1986.** *Managing protected areas in the tropics*, 300 pp. IUCN/UNEP Programme, Gland, Switzerland.
- McNeely JA. 1988.** *Economics and biological diversity: Developing and using economic incentives to conserve biological resources*, 232 pp. IUCN, Gland, Switzerland.